

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tentunya dibutuhkan peran dari para negara (*state actor*) terutama dalam organisasi internasional. Kerja sama yang dilakukan tidak hanya sebagai manifestasi dari landasan suatu ketetapan yang disepakati bersama, tetapi juga untuk menyeimbangkan kepentingan para negara besar dan mendorong operasionalisasi rezim terkait keamanan internasional (Goodrich, 1965). Oleh karena visi ini, maka negara tentunya memiliki kepentingan, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, serta potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional. Dalam konteks fasilitasi dialog dan pembentukan norma antar negara, dibutuhkan suatu forum multilateral, dengan rezim yang ter-institusionalisasi dan menjadi acuan para negara anggotanya dalam membahas dan menyelesaikan permasalahan. Namun tentu ada rintangan dimana penyelesaian permasalahan keamanan, seperti contoh dari apa yang terjadi dalam Majelis Umum PBB, para negara yang merasa netral tidak tertarik dengan pembahasan isu sensitif, dan memilih untuk tidak melawan para negara kekuatan besar yang berpotensi untuk meluas (Fifield, 1957). Konteks keamanan dan perdamaian internasional sering dikaitkan dengan dua jenis situasi, yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif yang menegaskan hal-hal yang berbeda, serta adanya norma diantara negara anggota karena pertimbangan posisi nasional dan keterkaitan suatu negara terhadap suatu permasalahan (Kurtz, 1999).

Ketika berbicara mengenai politik luar negeri, maka akan erat dengan kepentingan yang ingin dicapai serta apa saja obyektif yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan posisi suatu negara. Dalam hal ini tentu kebijakan luar negeri yang menjadi wujud dalam upaya pencapaian kepentingan suatu negara. Upaya tersebut yang dikenal sebagai kebijakan luar negeri (*foreign policy*) dikenal dalam bentuk kebijakan, pernyataan unilateral, aksi-reaksi terhadap suatu kejadian

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

internasional, dan keterlibatan aktor non-negara di dalamnya – yang di mana hal ini menjadi upaya untuk mengontrol dampak dari lingkungan luar negeri ke dalam situasi domestik (Nossal, 1998; Mansbach, 2000). Tentunya, berbagai tekanan yang datang dari luar negeri, serta kapabilitas domestik menjadi pertimbangan dalam bagaimana dan sejauh apa suatu kebijakan luar negeri dimanifestasikan, terutama dengan gagasan dari Kissinger yang dikenal dalam motto “*foreign policy start when domestic policy ends*”, dan hal ini menjadi bukti bahwa kepentingan domestik yang sadar akan keterbatasan dan keinginan yang ada di transformasikan dalam perilaku negara dalam tatanan internasional (Kissinger, 1971). Dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang dibangun oleh negara dalam tataran internasional tentunya dalam HI dilakukan dengan mempertimbangkan komponen domestik dan internasional. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Holsti yang menyebutkan bahwa perilaku negara terhadap lanskap politik internasional, keputusan, dan aspirasi yang ada merupakan bagian dari perilaku dalam gambar yang lebih besar (Holsti K. , 1983). Oleh karena itu, rasionalisasinya adalah bahwa kesinambungan aksi pemerintahan suatu negara dalam mencapai kepentingannya secara jelas terhubung melalui orientasi dan peran yang diambil. Semua proses ini tentunya tidak akan lepas dari bagaimana diskursus sejarah, politik, psikologi kepemimpinan, dan aspek ilmu sosial lainnya bermain dan saling berkontekstualisasi, karena apabila tidak terjadi proses sedemikian rupa, maka suatu kebijakan luar negeri bisa dianggap sebagai suatu kesalahan dan menimbulkan analisis kebijakan yang tidak tepat (Snyder, Bruck, & Sapin, 1962; Frankel, 1963).

Tentunya kebijakan luar negeri adalah suatu hal yang tidak lepas dari marwah bagaimana suatu pemerintahan negara mengelola kepentingan dan memobilisasikan sumber dayanya, terutama dalam keadaan yang menuntut, atau dalam posisi yang sangat menguntungkan sekalipun. Baik dalam perspektif realisme maupun liberalisme, politik luar negeri dianggap sebagai suatu hal yang sama-sama berkuat pada kepentingan negara. Dan hal ini menjadi fokus dalam navigasi kelanjutan interaksi negara dalam sistem internasional yang dinamis dan anarki, namun sambil menggalang

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kerja sama melalui diplomasi yang terarah. Studi hubungan internasional dalam hal ini tentu menjadi fokus utama, terutama dalam bagaimana suatu negara yang dipimpin suatu individu memilih opsi yang ada sebagai suatu aktor yang rasional (Newmann, 1998), dan sebagai hasil dari performa birokrasi pemerintahan suatu negara dalam penyelenggaraan urusan negara yang berkaitan dengan politik luar negeri (polugri). Argumen yang ada juga diperjelas kembali oleh penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, pastinya memiliki pendirian yang sejenis (*common ground*) seperti apa yang terjadi saat pandemi Covid-19, dan dalam melaksanakan peran sebagai bagian dari komunitas internasional dalam teater global pasca perang dunia (Jose & Putri, 2021).

Perlu diketahui bahwa kepentingan suatu negara yang di manifestasikan dalam kebijakan luar negerinya pasti bermuatan akan ambisi dan obyektif untuk memperluas pengaruhnya pada tataran yang dimungkinkan. Umumnya dalam perspektif realisme, negara mencapai hal tersebut melalui proyeksi kekuatan (*power projection*) untuk mencapai keseimbangan (*balance of power*). Namun, walaupun polugri dalam sifat yang lebih kolaboratif dan liberalis ini masih menyebut akumulasi kekuatan sebagai salah satu bagian dalam proses (Doyle, 1997), perlu diketahui bahwa hasil akhir dari akumulasi kekuatan tersebut bukanlah digunakan secara represif untuk melawan negara lain melalui konflik terbuka. Namun, yang dilakukan justru adalah menggunakan kekuatan tersebut sebagai bagian dari posisi tawar dalam negosiasi untuk mencapai kepentingannya sambil mempertahankan integritas perdamaian yang ada tanpa harus konflik terbuka secara tradisional. Apabila dalam resolusi konflik antar individu, status hierarkis sosial menjadi salah satu kekuatan tawar, maka begitu juga suatu negara, yang di mana dalam klasifikasi penelitian ini fokus pada negara *small power*, *regional power middle power*, *great power*, dan *superpower* yang merupakan struktur kekuatan dalam konteks HI. Perlu diketahui bahwa klasifikasi ini semuanya memiliki satu makna, yaitu status power akan menentukan bagaimana negara berinteraksi dalam tatanan global sambil mendorong isu yang menjadi kepentingan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mereka untuk membentuk hasil kerja sama maupun pengaruh pada tataran global secara langsung, baik secara unilateral maupun melalui organisasi internasional (Jordaan, 2003). Oleh karena itu, interaksi negara yang ada dalam isu tertentu tentunya harus memperhatikan kontribusi mereka dalam tatanan global melalui kerja sama maupun tindakan asertif yang menggunakan kekuatan tradisional mereka. Penelitian ini menekankan bahwa realita *state-society complex* yang dialami oleh para negara, dalam konteks ini misalkan *middle power* dan *great power*, harus memperhatikan kapasitas diplomatik dan kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan kebijakan mereka yang mempunyai fitur-fitur seperti upaya untuk mendorong *positive inducement* yang dapat diterima oleh negara tujuan dari diplomasi tersebut (Ikenberry & Kupchan, 1990). Maka itu dapat disimpulkan bahwa sebagai kekuatan *middle power*, maka Indonesia dalam hal ini harus mendorong pendirian yang lebih kolaboratif, mempertimbangkan resiliensi ekonomi belum sebesar sekarang, dan perlu diketahui bahwa pengkristalan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah besaran biaya pajak.

Perdamaian dan keamanan internasional harus fokus pada usaha menumbuhkan rasa kebersamaan (*shared values*) yang akan membentuk perilaku internasional suatu aktor negara untuk mempertahankan hal tersebut melalui komitmen unilateral mereka (Hurd, 1992). Kompleksitas dalam tatanan internasional mengenai isu keamanan dan perdamaian membuat diskursus ini tidak dapat dipisahkan dari konteks interaksi aktor, dan bagaimana aktor tersebut memainkan peran mereka dan membentuk jalur konstelasi diplomasi oleh negara untuk menempuh jalur perdamaian (Indrawan, 2019). Agar hal ini tercapai menjadi suatu kenyataan, maka tindakan kolektif, baik melalui pembentukan suatu komunitas keamanan dengan rezim yang terorganisir dan ter-institusionalisasi dengan baik, maupun mengurangi dilema keamanan menjadi dogma utama dalam diskursus keamanan dan perdamaian internasional (Aji & Indrawan, 2019). Keamanan dalam usaha untuk mempertahankan dan mencapainya tentunya juga dapat ditempuh melalui jalur yang lebih damai dan tidak melibatkan proyeksi kekuatan yang berdampak pada munculnya konflik fisik maupun bersenjata. Menurut

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

rasionalisasi aktor negara dan studi dari apa yang terjadi dalam sejarah dunia, aktor yang saling bertikai juga terus mendorong penyesuaian posisi mereka dan melakukan diplomasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Miall, 2007). Hal ini dilakukan setelah proses penawaran (*bargaining*) terjadi dan saling menjaga kerja sama untuk mencapai visi bersama yang kepentingannya signifikan dan beririsan sebagai usaha komplementer. Dalam hal ini, tentu peran institusi internasional, seperti PBB menjadi penting dan organ seperti DK PBB memberikan ruang untuk memfasilitasi keberadaan dari visi bersama yang ingin dicapai dan bagaimana hal itu dapat hidup berdampingan (*coexist*) dengan proses perdamaian yang dibuat dari masyarakat sipil/ proses domestik maupun intervensi internasional (Savir, 2008). Intervensi yang dilakukan negara dalam level multilateral tentu akan melibatkan bagaimana kebijakan luar negeri membentuk prioritas, serta secara khusus menjadi pembentuk kelompok-kelompok blok politik/ divisi kawasan yang berinteraksi dengan kepentingan dan proposisi yang berbeda satu sama lain (Thakur, 1999).

Perdamaian dan keamanan internasional adalah hal utama yang menjadi poros daripada diplomasi dan politik luar negeri negara-negara di dunia. Konsepsi ini sendiri bukan semata-mata merupakan hasil dari pemikiran dasar negara sebagai aktor rasional yang realis, namun merupakan suatu keniscayaan bagi sistem internasional. Dalam hal ini tentunya peperangan sebelumnya sudah melibatkan negara untuk menghindari konflik dan mendirikan suatu fondasi kerjasama dan platform untuk meningkatkan kepercayaan (*confidence-building*) dan menjadi tempat untuk norma berproses (*norm processing*) demi keamanan dan perdamaian internasional. Yang dimana salah satu wujudnya adalah terbentuknya PBB (Persekutuan Bangsa-Bangsa) yang merupakan suksesi dari LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Dalam kajian HI, terutama dalam isu keamanan dan perdamaian internasional, PBB dinilai mengaplikasikan resolusi konflik melalui intervensi yang disetujui oleh forum multilateral untuk menciptakan perdamaian dan manifestasi diplomasi preventif (Berdal, 1996). Dalam prosesnya, PBB menjadi suatu entitas yang diperhatikan oleh komunitas internasional, terutama

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dalam isu mitigasi konflik domestik (*intra-state conflict*), isu kemanusiaan, dan berbagai area yang membutuhkan fasilitasi PBB terhadap bantuan serta intervensi entitas internasional, hingga kepada aspek ekonomi dan sosial (Clements & Ward, 1994).

Dalam prosesnya, perlu diketahui bahwa suatu institusi internasional beroperasi pada rezim yang dibentuk, dalam hal ini secara kolektif, karena PBB merupakan institusi yang dibangun atas piagam PBB, dan memiliki 193 negara anggota hingga saat ini. Negara dalam hal ini memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan dan posisi mereka dalam isu-isu baik yang bersifat tematik maupun spesifik kepada kasus suatu negara (*country-specific issue*). Dengan adanya dua perbedaan yang muncul dalam memandang agenda diatas, maka PBB dalam hal ini menjadi suatu domain yang harus diperhatikan oleh para negara anggota dalam proses pembentukan norma. Tentunya karena hal ini sarat dengan kepentingan para major power yang cenderung mempolitikasi agenda-agenda di PBB untuk mempertahankan hegemoni mereka. PBB merupakan suatu institusi yang memiliki rezim (piagam PBB) yang dimandatkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tentunya menerima proses induksi yang secara langsung dipengaruhi oleh kepentingan negara, yang dalam proses diplomasi multilateral itu sendiri dibagi dalam tiga tahap: *norm shaping* (pembentukan norma); *norm setting* (penetapan norma); dan *norm sharing* (pembagian norma). Proses tarik menarik dalam diplomasi multilateral tentunya melibatkan usulan norma yang diusung 193 negara anggota PBB (dalam kasus MU PBB), dan melibatkan kepentingan politik para lima negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB. Norma tersebut yang telah disepakati dan dibentuk, *regardless* bersifat mengikat atau tidaknya terhadap suatu isu/ proposisi permasalahan akan menjadi patokan untuk negara dan institusi internasional dalam membentuk *judgement* mereka sendiri dan posisi terhadap norma yang dibentuk dengan peraturan yang relatif jelas dan pasti (Keohane, 1990).

Dalam pembahasan mengenai kebijakan luar negeri, diplomasi multilateral, dan peran PBB sebagai organisasi internasional dalam isu perdamaian dan keamanan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

internasional, perlu diketahui bahwa pasca perang dunia 2, ketidakpastian global akan terus memberikan iklim yang berbeda dalam politik internasional. Iklim yang berbeda inilah nantinya akan membuat para negara dalam sistem internasional berinteraksi dan berpindah, dari iklim di mana ketika PBB awal dibentuk untuk mencegah perang dunia ketiga dan membentuk unipolaritas, menjadi suatu wadah untuk negara semakin memperhatikan isu yang terpusat pada rakyatnya sendiri (*people-centered*) dan tatanan multilateral akan menyesuaikan dirinya, untuk mencapai agenda 2030 (dalam konteks kontemporer saat ini) (UN DESA, 2016). Namun, satu hal yang masih persisten adalah, dalam isu *high politics* (tingkat politis yang tinggi), PBB akan terus berusaha untuk menyelesaikan konflik dan menuntut akuntabilitas dari pihak yang berkonflik untuk tidak mengancam tatanan perdamaian dan keamanan internasional yang sudah bertahan hingga hampir 76 tahun ini. Tentunya, meskipun perdamaian itu sendiri mungkin bersifat perdamaian negatif bagi beberapa pihak tertentu dalam situasi tertentu, PBB tetap hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada dan akan ada untuk menciptakan perdamaian positif. Tentunya salah satunya melalui tatanan hukum internasional yang bersifat *jus post bellum* (konsep moralitas untuk menciptakan penghentian perang) agar terus didorong secara kolektif melalui peran PBB dan diplomasi para aktor negara (Breen, 2011). Selain daripada konteks keamanan tradisional yang sangat sentris pada aktor negara, PBB juga menangani lebih dalam isu-isu keamanan non tradisional melalui DK PBB seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan isu lainnya yang mengancam keamanan manusia (*human security*). Negara dalam menangani permasalahan seperti ini tentu menggunakan DK PBB dalam 3 hal utama: (1) sebagai jaminan kepada publik bahwa komunitas internasional terus menggunakan standar dan mekanisme yang terbentuk dalam bekerjasama; (2) untuk memberikan sanksi yang selektif dan terarah dengan jelas terhadap entitas yang mengganggu perdamaian dunia dalam level kawasan/ yang lebih luas; dan (3) dan sebagai *governing entity* dari norma serta berbagai ketetapan multilateral yang

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengikat untuk dijadikan preseden kuat dalam penegakan hukum internasional dan perdamaian kolektif (Bailey, 1993).

Lebih dalam lagi, tentunya perdamaian dan keamanan internasional serta peran PBB dan DK PBB secara khusus tentunya menunjukkan bahwa dilema, proliferasi kekuatan, dan keinginan untuk lari/ melawan aksi dari negara lain membuat siklus konflik pada dasarnya adalah akumulasi dari rasa ketidakamanan aktor negara (Herz, 1950). Oleh karena itu, umumnya strategi yang dilakukan adalah revitalisasi hubungan antar negara, yang dalam hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan *rapprochement* (mendirikan relasi yang harmonis), dan bisa melalui *confidence-building measures* atau yang dikenal sebagai CBM untuk mengurangi ketidakamanan dan meningkatkan kepercayaan antar negara untuk menghindari konflik. Kemudian pastinya muncul pertanyaan, bagaimana kedua hal ini berkaitan dengan PBB dan peran negara sebagai aktor dalam diplomasi di sistem dunia yang anarkis. Dalam menjawab hal ini, perlu diketahui bahwa dalam upaya menumbuhkan perdamaian (*peacemaking*) melalui usaha perdamaian (*peacebuilding*). Pertama, PBB menyediakan alat mediasi dan memberikan tatanan yang pasti untuk koordinasi operasi perdamaian dan memutuskan implementasi misi perdamaian dan resolusi untuk penyelesaian masalah keamanan dan politik di PBB (Gambari, 2016). Kedua, PBB menjadi organisasi para negara dan organisasi untuk para negara untuk menjaga perdamaian internasional ditengah sistem *pluralistic state* yang mengalami defisiensi, dan memperluas kesempatan untuk pencapaian target dan kerja sama dan menyelesaikan tantangan dengan sikap yang non-agresif (*Pacific settlement of Disputes*) (Claude, 1996). Tentunya di sini peran negara anggota PBB seperti Indonesia berguna juga sebagai *pathfinder* atau pencari jalan untuk identifikasi sumber dan mekanisme baru yang berguna untuk resolusi konflik yang damai dan meningkatkan partisipasi dan konsistensi komunitas internasional terhadap keinginan untuk perdamaian dan keamanan dunia (Christie & Algar-Faria, 2020). Lokalisasi solusi perdamaian membutuhkan peran dari aktor non-negara, komunitas para pembuat kebijakan, dan di kaji lebih lanjut dalam dunia akademik,

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

semua untuk kebaikan dan signifikansi dari emansipasi perdamaian yang dilakukan untuk memberikan dampak dari global ke lokal (Paffenholz, 2015).

Dalam pencapaian target dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, tentu suatu mekanisme yang melibatkan banyak negara (multilateral) menjadi suatu arena yang strategis baik dalam teater operasional maupun ide. Tentunya diperlukan suatu entitas resmi yang kuat dan bersifat mengikat, dan DK PBB dalam sejarahnya hadir sebagai badan yang melakukan mitigasi dari konflik dan peperangan tersebut. Secara jelas ditegaskan bahwa *state of war* atau kondisi peperangan yang terjadi di suatu negara dapat dicegah apabila pengelolaan kekuatan (*management of power*) dilakukan oleh negara-negara pemimpin atau negara-negara mayoritas (dalam hal ini adalah lima negara anggota tetap DK PBB) dalam sistem internasional melalui praktik diplomasi dan hukum internasional mengikat (*customary international law*) (Dunne & Schmidt, 2001). Lebih lanjut, ini menjadi bukti bahwa perdamaian dan keamanan internasional dapat tercipta melalui kerja sama multilateral dan tidak harus melibatkan eskalasi konflik karena kerja sama dalam sistem internasional yang anarki bisa di fasilitasi dengan rezim yang tepat (Dunne, 2001). Rezim ini juga membutuhkan pengaturan norma yang mengikat dalam implementasinya, dengan DK PBB yang memiliki kekuatan mengikat yang diatur pada pasal lima Piagam PBB, maka fasilitasi interaksi negara bisa dilakukan dan institusionalisasi rezim tetap berjalan. Tidak hanya sempit pada isu politik keamanan, diplomasi multilateral juga dibutuhkan dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial karena peran aktor non-negara juga sangat penting dalam mengurangi celah pembangunan dan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi (Hasan & Hasan, 2013). Contohnya adalah isu konflik di wilayah Sahel di Afrika yang dibahas oleh DK PBB menjadi mata agenda, dan DK PBB juga secara terus menerus membahas implikasi multidimensional dari konflik di Sahel dalam konteks ekonomi sosial. Lalu, aktor non-negara menjadi entitas yang diatur dan menjadi *referent object* dari norma dan apa yang menjadi solusi yang dibahas dan dinegosiasikan pada level multilateral. Apabila kita tinjau dari studi sebelumnya, hal

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ini ditegaskan dalam konteks keamanan manusia (*human security*), namun untuk tidak memperlebar konteks – penulis berargumen bahwa perdamaian dan keamanan internasional dapat tercapai apabila transformasi konflik, perdamaian, dan keamanan di interpretasikan dengan pandangan yang sesuai (Lahiry, 2019).

Lebih dalam, tentunya norma tersebut terbentuk dari intervensi para aktor negara di dalam DK PBB, dan di umur ke tujuh puluh enam tahun dari PBB itu sendiri peran DK PBB masih sangat relevan dan bahkan veto masih perlu dipertahankan walaupun banyak kritik. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa intervensi negara-negara yang terwujud dalam norma yang dihasilkan dalam resolusi DK PBB juga berfungsi menunjukkan otoritas global dalam menyelesaikan permasalahan yang mengancam, dan juga untuk intervensi dalam membantu pemerintah yang sedang bermasalah dalam menangani urusan politik dan keamanan mereka di tengah keterbatasan kapasitas dan upaya domestik. Selain itu, peran lain dari DK PBB adalah memutuskan kebijakan dari level multilateral dan norma penting dalam inisiasi program pasca konflik. Adapun salah satu contohnya adalah untuk pemulihan negara yang bersangkutan dan membawa kembali tatanan sosial (*social order*); dan rekonstruksi kembali institusi dan rezim domestik untuk kembali operasional dan organisasi internasional mendorong kembali program bantuan sektoral dan perlakuan asistensi mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara (Gordon, 2014).

Namun, tentunya peran intervensi DK PBB sebagai entitas terkuat dalam sistem internasional untuk menegakkan keamanan dan perdamaian tidak akan lepas dari perkembangan isu geopolitik. Kondisi geopolitik tentunya menjadi pertimbangan negara anggota dalam menentukan posisi mereka dalam pembahasan isu di level multilateral. Salah satu contoh yang kuat adalah ketika AS melakukan veto terhadap rancangan resolusi (ranres) untuk menetapkan de-eskalasi baku tembak di Israel dan ancaman terhadap warga sipil di Palestina pada Mei 2021, Tiongkok mengkritik AS karena mereka mengkhianati gagasan kebijakan luar negeri AS yang mempromosikan *rule-based international order* sementara itu AS tidak melakukan kewajibannya

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan veto ke ranres yang ada (Sajid, 2021). Apabila kita perdalam, gagasan mengenai visi AS untuk menciptakan *rule-based order* banyak disuarakan pada isu geopolitik di Indo-Pasifik melalui visi *Free and Open Indo-Pacific* yang dimiliki AS sebagai upaya *balancing* terhadap hegemoni Tiongkok (Anwar, 2020). Tiongkok menggunakan narasi yang selalu di advokasi AS untuk menentang visi ekspansionis Beijing sebagai senjata dalam kritik kebijakan terhadap veto AS di DK PBB, serta rasionalisasi posisi Tiongkok yang sering mengalami *close encounter* dengan pihak AL AS pada beberapa kejadian di Laut China Selatan (LCS). Hal ini menurut penulis kembali menunjukkan bahwa pertikaian regional akan memicu kembali kompetisi pada tatanan yang lebih besar, serta mendorong internasionalisasi agenda yang terkadang kontra produktif dengan apa yang seharusnya dicapai. Mempertimbangkan perluasan dari konteks rivalitas geopolitik, keamanan kawasan, dan diplomasi multilateral membuat studi keamanan harus mampu menjelaskan bagaimana para aktor melakukan eksplorasi dalam mempertahankan kelangsungan hidup sebagai *coping mechanism* yang ada (Singh & Nunes, 2016).

Berikutnya dalam DK PBB, tentu ada kehadiran para negara-negara yang memiliki agenda revisionis dalam memperbaiki arsitektur keamanan internasional termasuk dalam DK PBB itu sendiri. Walaupun banyak negara (termasuk para negara *middle power*) tidak terlalu mendorong advokasi atau acuh tak acuh dalam mereformasi PBB, namun perbaikan tentunya diperlukan dalam rangka meningkatkan kredibilitas dari DK PBB untuk meraih kepercayaan dan dukungan strategis komunitas internasional. Hal ini tentu berangkat lebih jauh dari apa yang dibahas pada penelitian Bank Dunia mengenai motivasi politis negara berkembang masuk pada DK PBB untuk memperoleh bantuan luar negeri dari para negara besar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa efektivitas dana bantuan luar negeri itu sendiri yang diberikan pada suatu negara ekonomi berkembang malah tidak efektif dan cenderung menurun pada masa keanggotaan dalam DK PBB (Dreher, Eichenauer, & Gehring, 2018). Tidak terbatas pada demikian saja, DK PBB juga memberikan kepada negara-negara *middle*

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

power anggota tidak tetap DK PBB untuk memperdalam tiga peran utama yaitu sebagai advokator dari ide politik luar negeri kawasan dan negaranya masing-masing secara unilateral; sebagai *assembler* atau pengumpul/ “koordinator” untuk memperdalam kerja sama institusional dan anti veto (dalam DK PBB); serta *enforcer* atau para penegak yang menggunakan *hard power* atau kekuatan militer namun mereka bergantung sangat pada peran sesama negara *middle power* dalam fora multilateral dan regional (Hidayatullah, 2017).

Peran negara berkembang tentu dibutuhkan dalam pembinaan perdamaian dan mempertahankan keamanan internasional, kajian sebelumnya menegaskan bahwa peran negara *middle power* seperti Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kemampuan material dan bagaimana para pembuat kebijakan luar negeri memahami posisi sistemik mereka dalam pembentukan poligrinya (Roberts, Habir, & Sebastian, 2015). Penelitian ini meyakini, walaupun saat ini negara *middle power* sudah teridentifikasi di berbagai kawasan di dunia, isu seperti restrukturisasi kebijakan luar negeri, terutama pada isu keamanan internasional akan terus dijalankan. Hal ini semata-mata tidak hanya karena perbedaan karakteristik politik internasional pasca perang dunia 2 ketika PBB terbentuk hingga politik internasional di 1-2 dekade ke belakang. Penelitian ini meyakini bahwa isu ini akan terus dibutuhkan untuk dikaji mempertimbangkan *middle power* pada saat itu berbeda dengan karakter *middle power* lima hingga sepuluh tahun ke belakang yang memiliki beberapa sifat berbeda dengan *middle power* tradisional sebelumnya (Patience, 2014). Dalam hal ini tentunya restrukturisasi kebijakan luar negeri akan membutuhkan pertimbangan yang tepat, untuk menentukan modalitas apa yang tentunya membuat konsepsi *middle power* dahulu akan berbeda, namun penulis tidak akan merinci hal ini lebih lanjut karena di luar batasan penelitian, dan hanya akan berfokus pada Indonesia sebagai aktor utama di DK PBB dan proses dari restrukturisasi kebijakan luar negerinya. Penelitian sebelumnya sudah ada yang mengkaji bagaimana konsep *middle power* saat ini tidak lagi relevan, walaupun penulis menganggap kajian ini hanya berfokus pada hegemoni dan tren unipolar dan tensi polugri antar *middle*

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

power terjadi dan tarik menarik dengan posisi mereka di level kawasan (Jordaan, 2017).

Indonesia sudah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yaitu pada tahun 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020 dan pada keanggotaan tahun 2019-2020 sendiri Indonesia mengambil tema “*A True Partner for World Peace*” yang mengusung prioritas *four plus 1* (4+1) selama masa keanggotaannya yaitu: (1) mempromosikan stabilitas dan perdamaian internasional melalui dialog damai dan resolusi konflik yang menegaskan pada peran pasukan perdamaian, peran wanita dalam perdamaian global (isu *Women, Peace, and Security/ WPS*), dan peningkatan kualitas dari misi perdamaian itu sendiri; (2) mensinergikan kepentingan dan hubungan organisasi regional untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan kawasan; (3) penguatan kerja sama kontra-terorisme dan keamanan terhadap kekerasan ekstrim melalui pendekatan komprehensif; (4) peningkatan skala dan intensitas kerja sama untuk agenda pembangunan berkelanjutan dan proses perdamaian yang inklusif; dan plus satu adalah perhatian khusus untuk isu Palestina (MoFA Indonesia, 2019). Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas bagaimana peran Indonesia melalui Pemerintah RI (Pemri) dilakukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, maupun melakukan refleksi terhadap keanggotaan Indonesia di DK PBB.

Penelitian sebelumnya fokus kepada bagaimana Indonesia mampu melaksanakan diplomasi multi-trek dan menjadi mitra utama dalam bina damai dan menyalurkan *soft power* Indonesia (Maghfura, 2019). Berikutnya, peran Indonesia dalam DK PBB juga dikaji dalam perspektif regional, di mana keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB membawa subordinasi baru dari level multilateral ke regional, dan mendorong isu Myanmar untuk di sinergiskan dengan kepentingan geopolitik Indonesia dalam mendukung *ASEAN-led mechanism* dan rekomendasi Kofi Annan melalui peran *natural leadership* Indonesia (Sitamala, 2020). Hal ini sejalan dengan literatur yang telah didiskusikan sebelumnya dalam bagian penelitian ini yang membawa narasi *norm entrepreneurship* (atau inisiator, lebih mudahnya) dari level

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

regional ke fora multilateral dan tarik menarik yang ada (Hidayatullah, 2017; Nolte, 2010; Pay & Postolski, 2021).

Penulis berpendapat bahwa peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK akan lepas dari bagaimana suatu pola aktor berorientasi terhadap dinamika dan obyektif polugri yang bisa berubah dan tidak stagnan dalam waktu dan ruang apapun. Dengan permasalahan keamanan non-tradisional dan isu transnasional yang menjadi salah satu bagian dari cakupan mata agenda yang di mana Indonesia berpartisipasi, maka Indonesia membutuhkan dukungan dari para aktor negara terutama dalam mengatasi kejahatan dan terorisme yang sifatnya lintas batas (Wett, 2004). Indonesia juga selama di DK PBB fokus pada isu-isu strategis lainnya seperti perhatian yang lebih mendalam pada isu yang politis seperti agenda non proliferasi nuklir. Hal ini dibahas secara mendalam pada penelitian oleh Sulistyono (2007) yang membahas peran Indonesia dalam penyelesaian krisis nuklir Iran pada keanggotaan Indonesia di DK PBB tahun 2007-2008. Bentuk restrukturisasi pada penelitian ini berfokus pada posisi Indonesia dalam pendukung resolusi 1747, 1803, dan revisi kebijakan akibat tekanan domestik dari parlemen (Sulistyo, 2007; Setiawan & Yani, 2019). Pada penelitiannya ditegaskan bahwa Indonesia berusaha memainkan peran melalui kewajiban moral sebagai kontributor perdamaian dunia (Sulistyo, 2007).

Hal ini menegaskan bahwa pendekatan-pendekatan berbeda yang ada di DK PBB menahan laju kesepakatan akan resolusi DK PBB yang kuat, oleh karena itu Indonesia harus mengurangi tensi dan memperbanyak kohesi untuk merekatkan berbagai anggota (Sulistyo, 2007). Narasi ini tentu sangat kuat akan nuansa Indonesia sebagai *bridgebuilder* dalam diplomasi multilateralnya di PBB sebagai negara *middle power* yang memainkan peran sebagai yang menyelesaikan masalah. Narasi mengenai Indonesia memainkan peran aktif di PBB sebagai *problem solver* ini juga diwujudkan untuk mendorong identitas Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim yang bersifat moderat dan terbesar di dunia sebagai citra internasional bangsa (Reid, 2012). Tentunya dalam mendorong citra internasional ini diperlukan modalitas yang kuat dan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia terus mengarahkan poligrinya melalui rezim demokrasi yang lebih kokoh di era reformasi dan memperdalam peran dalam mengelola tensi pada isu kawasan maupun isu global yang lebih luas dengan *outward engagement* yang selalu bermain keluar (Elson, 2012).

Dalam mengarungi dinamika global yang selalu dinamis dan berbagai rivalitas dan kerja sama yang terjalin di PBB, Indonesia juga sadar betul bahwa dari *institutional memory* yang ada, perlu dilakukan reformasi untuk mencapai ketahanan dan mempertahankan relevansi dengan tuntutan komunitas internasional dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini digagas lebih lanjut dalam penelitian Syarif (2020) yang menegaskan bahwa ketidakefektifan PBB dan inefisiensi yang terus terjadi harus diselesaikan dengan reformasi DK PBB dalam menghilangkan tantangan birokratis dan untuk mengurangi eksklusifitas dari kelima negara anggota tetap DK PBB (*Permanent Five* atau P5). Dijelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang lebih diterima sebagai negara yang memiliki *tone* kebijakan yang lebih netral dan aktif beraksi konkret untuk perdamaian dunia yang terbuka lebar melalui kontribusi besar pasukan perdamaian dan fasilitasi proses bina damai (Syarif, 2020).

Narasi reformasi DK PBB banyak dikaitkan dengan narasi arus utama (*mainstream*) yaitu penghapusan hak veto para negara anggota tetap DK PBB, hal ini dinilai sebagai suatu status kedaulatan yang lebih tinggi yang ternyata melemahkan DK PBB itu sendiri dalam menyatakan kekuatannya untuk isu global yang bertentangan pula dengan prinsip persamaan kedaulatan (*principle of equal sovereignty*) (Afrilianti, Ardianto, & Pebrianto, 2021). Walaupun Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda, di mana hak veto dalam hal ini dikaji kembali agar menyesuaikan dengan substansi dan representasi yang sudah berubah secara fundamental dan agar sesuai dengan realita politik internasional (Kemlu RI, 2016). Menurut Rizal Sukma pada penelitian terdahulunya, politik luar negeri Indonesia, reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia akan selalu terkait dalam dua hal yaitu perubahan dari status *low profile* ke

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

high profile serta aktivisme sebagai negara non-blok yang bertekad untuk menciptakan tatanan baru (Sukma, 1995).

Indonesia tentunya sadar betul bahwa sebagai *middle power*, restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia tentunya harus mendorong suatu ketahanan fungsional dan ideal untuk menangani koalisi yang sudah terbentuk secara sistemik di DK PBB karena pengaruh dari P5. Dominasi dari suatu koalisi yang terbentuk di DK PBB umumnya terlihat sangat jelas dalam proses voting suatu rancangan resolusi (ranres), dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Rusia dan Tiongkok menjadi *contending power* utama dari dominasi AS dengan negara Eropa Barat. Adapun dalam hal ini negara anggota tidak tetap DK PBB biasanya menjadi lahan persaingan untuk meraih dukungan, namun banyak dari data 2001-2012, negara anggota tidak tetap seperti Afrika Selatan, Brazil, Qatar, dan negara lainnya di Asia Pasifik dan Afrika (termasuk Indonesia) tercatat rata-rata bermitra dengan Tiongkok atau Rusia untuk menentang adopsi ranres yang di ajukan oleh AS maupun sekutunya (Monteleone, 2014). Hal ini menunjukkan tentunya bahwa Indonesia tercatat sebagai negara potensial untuk menjadi mitra maupun lawan dari tatanan yang sudah ada terutama dalam konteks kepemimpinan yang terbentuk di DK PBB itu sendiri. Namun, Indonesia tidak semata-mata mengikuti *status quo* yang ada dan merestrukturisasi kebijakan luar negerinya dengan mendorong advokasi *middle power* untuk mereformasi DK PBB.

Reformasi DK PBB sendiri dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan realita terkini dan tetap menjaga ketahanan PBB dalam legitimasi tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah PBB menjadi alat dikte dari negara tertentu (Bandoro, 2005). Untuk memperdalam lebih lanjut, penelitian sebelumnya dari Puspita (2020) menjelaskan bahwa sebagai anggota tidak tetap DK PBB, tentunya performa Indonesia juga akan bergantung dari modalitas dan kapasitas hukum yang dimiliki untuk terutama dalam meraih peran sebagai percontohan. Untuk isu keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim di DK PBB, tentu pemerintah Indonesia (Pemri) dalam hal ini harus berkontribusi pada proses konsolidasi multilateral yang juga

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melibatkan hal fungsional lain seperti penyelesaian sengketa, pembahasan deliberatif, pengorganisasian, dan lainnya berdasarkan rezim internasional dan norma global yang disepakati (Puspita, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan juga membahas mengenai bagaimana para anggota tidak tetap yang tergabung di PBB menerima bantuan luar negeri yang lebih besar dari negara-negara *major power*, hal ini tentu akan berpengaruh ke pendirian serta pendekatan politik (*political favor*) yang akan berubah serta akan ada banyak hal yang harus ditukar (*trade off*) yang terjadi apalagi status anggota tidak tetap DK PBB memiliki keuntungan diplomatiknya tersendiri dalam membahas agenda perdamaian dunia (Kuziemko & Werker, 2006). Lebih lanjut, proses pembuatan kebijakan luar negeri yang membentuk tatanan dunia baru pasca perang dunia mempengaruhi hasil yang akan berdampak pada kelanjutan suatu isu terkait perdamaian dan keamanan internasional serta bagaimana mekanisme PBB mampu secara efektif menyelesaikan isu tersebut (Bosco, 2009). Menurut penulis tentu hal ini akan membentuk perubahan dan restrukturisasi kebijakan luar negeri calon-calon kandidat anggota tidak tetap DK PBB baik secara fungsional maupun pada tataran normatif, yang tentu akan mempengaruhi kelanjutan hasil resolusi DK PBB dengan para anggota tidak tetap bermain sebagai penyeimbang terhadap negara P5.

Karena para negara anggota tidak tetap yang kebanyakan merupakan *middle power* memiliki keterbatasan akibat prosedur yang sudah ditetapkan oleh Bab lima daripada piagam PBB, maka tentunya *middle power* harus menghadapi koersi dan melakukan internasionalisasi yang berperan untuk melakukan advokasi dari kepentingan regionalnya di level multilateral pada tatanan yang lebih kuat dan mengikat seperti di DK PBB. Tentunya negara-negara berkembang dan *middle power* memiliki peran lebih dalam pada proses pembentukan dan penetapan agenda yang akan dibahas, yang di mana hal ini diperkuat oleh sumber kekuatan “informal” para negara *middle power* dan kepentingan mereka dalam berdialektika dengan negara P5 yang terkenal akan vetonya dalam mempercepat/ memperlambat pembahasan suatu agenda melalui usaha-usaha yang bersifat prosedural (Binder & Golub, 2020). Para negara-

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

negara *middle power* ini bisa memberikan tekanan juga untuk membatasi penggunaan veto dari para P5, yang di mana narasi ini sering ditegaskan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan institusionalis dan penelitian yang fokus pada bagaimana para negara *middle power* juga meraih signifikansi kehadiran mereka di DK PBB melalui sumber kekuatan informal yang didukung dengan keterampilan dan mumpuninya para negara anggota tidak tetap dalam isu-isu teknis tertentu (Binder & Golub, 2020). Namun penelitian lebih lanjut memperdalam temuan baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dibahas pada tulisan ini, yaitu peran negara *middle power* di DK PBB untuk mengontrol pembahasan pada isu non tradisional seperti isu perubahan iklim, WPS (*women, peace, and security*), dan isu lain yang biasanya dikuasai oleh negara berkembang yang punya kontribusi tinggi juga pada mekanisme terkait isu non tradisional tersebut di tatanan global/ regional (Allen & Yuen, 2014). Penulis meninjau bahwa temuan-temuan dari penelitian ini memberikan makna bahwa seperti layaknya Uni Eropa yang mengikat negara anggotanya dengan kekuatan supranasional, para pemain yang bukan ikan paus (atau pemain besar) bisa mendorong laju organisasi yang lebih seimbang dan proporsional (Thomson, 2011). Tentunya ini dapat ditemui pada penelitian yang menekankan juga pada pemberian ekspektasi yang lebih optimis di tengah mencuatnya narasi-narasi atau kejadian yang mengancam keberlangsungan *status quo* yang sudah ada melalui terobosan, *bargaining* (daya tawar), dan manfaat dari hasil kerja sama di organisasi/ rezim yang mengikat tersebut (Cross, 2013).

Apabila dikaitkan dalam konteks kebijakan luar negeri, maka para *middle power* yang melakukan reorientasi maupun restrukturisasi secara penuh kebijakan luar negeri mereka juga berkuat pada bagaimana *middle power* menggariskan batas-batas akibat marjinalisasi yang dilakukan negara besar atau suatu institusi internasional terhadap negara *middle power* pada beberapa isu penting yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional (Glazebrook, 1947). Sentimen ini dibahas pada penelitian kuantitatif yang menyimpulkan bahwa isolasi dan marjinalisasi politik terhadap negara

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

anggota tidak tetap DK PBB akan menimbulkan kekuatan yang sangat besar (*overpower*) untuk para negara P5 dan akan mempersempit ruang perubahan dari negara *middle power* kecuali ada posisi bilateral yang cukup dekat dengan salah satu P5 (O'Neill, 1996). Penulis yakin bahwa sentimen ini sangatlah relevan, terutama dalam menjelaskan lebih detail antara diskursus neoliberalisme dan neorealisme dalam suatu institusi yang memiliki rezim mengikat, dan menawarkan penjelasan yang tegak lurus dengan rasionalitas kebijakan luar negeri *middle power* diantara *major power*. Dengan tatanan keamanan internasional saat ini merupakan suatu tanggung jawab yang terasumsikan kepada para P5, maka komitmen politik ini harus didorong dengan multilateralisme yang secara aktif menjadi makanan favorit para negara berkembang. Apalagi dengan mempertimbangkan negara *middle power* yang tersebar banyak juga di belahan selatan (*global south*) memiliki aksi kebijakan yang terkadang revisionis dengan *status quo* kekuatan yang sudah ada dan sensitif terhadap hegemoni terutama terhadap tatanan kekuatan global tradisional dari para aktor negara barat (Andersen, 2019). Penulis menanggapi bahwa ini menjadi satu kesatuan dengan situasi tarik menarik dengan kepentingan institusi internasional serta pembentukan norma yang didorong oleh aktor negara secara umum dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, secara spesifik pada sistem PBB.

Penelitian sebelumnya mengkaji restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia spesifik pada pendirian Indonesia terhadap proliferasi nuklir Iran yang diwujudkan dalam usulan amandemen dari Indonesia terhadap rancangan resolusi negara P5+1 selama masa jabatan DK PBB 2007-2008 (Setiawan & Yani, 2019). Kemudian, terdapat juga literatur yang membahas perubahan polugri Indonesia pasca era orde baru, yang menekankan pada melembutnya posisi Indonesia terhadap tekanan internasional pada perang Timor Timur, pandangan Presiden Abdurrahman Wahid pada "*Asia's Proposal*" dan bagaimana tekanan aktor eksternal mengubah perilaku polugri Indonesia dan demokratisasi diplomasi Indonesia (He, 2008). Lebih dalam pada tatanan ide dan normatif, penelitian sebelumnya juga melihat bagaimana

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

keberlanjutan dan perubahan dalam polugri Indonesia dibagi dalam 3 fase yaitu Soekarno, Soeharto, dan Megawati (Batubyal, 2002). Pada level regional, penelitian sebelumnya membahas bagaimana Presiden Jokowi memiliki tendensi yang *overlook* terhadap ASEAN dan urgensi kenapa Indonesia harus memperluas lingkaran konsentris polugrinya lebih luas daripada ASEAN (Rosyidin & Pattipeilohy, 2020). Penelitian sebelumnya fokus pada gaya kepemimpinan dan narasi yang dibawa oleh kepala pemerintahan Indonesia dari perspektif populisme yang membahas narasi diplomasi yang “pro-rakyat” dan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi komunikasi polugri Indonesia kepada publik (Wicaksana & Wardhana, 2021). Sedangkan literatur berikutnya membahas bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar untuk mendukung demokratisasi pada era SBY adalah bentuk usaha rekonstruksi citra Indonesia sebagai negara demokrasi dan untuk meraih kepemimpinan kembali di politik ASEAN (Purnama & Mahyudin, 2018). Yang terakhir adalah perubahan polugri Indonesia juga dilakukan pada era Jokowi untuk menyongsong identitas dan nilai Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui improvisasi pada birokrasi, faktor kepemimpinan, dan kesatuan arah dalam diplomasi maritim Indonesia (Pikoli, 2021).

Dengan penelitian ini menekankan pada restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB, maka beberapa hal yang tentunya dapat digunakan dalam memahami *process tracing* dari perubahan polugri tersebut haruslah mengkonstruksikan 3 faktor utama: norma, identitas, dan nilai yang dianut yang terus menjadi variabel yang tidak terpisahkan. Salah satu studi kasus yang relevan dalam melihat perubahan dan penentuan posisi Indonesia untuk isu strategis yang terus dibawa yaitu krisis Rohingnya dan situasi politik di Myanmar serta isu sistemik lain seperti konflik Israel-Palestina (Norlyanti, 2018). Adapun kajian dari Amitav Acharya secara spesifik melakukan generalisasi terhadap posisi Indonesia di DK PBB dari kacamata posisi konvergensi negara-negara ASEAN yang berfokus pada konstruksi tatanan ide dan tidak hanya materi dalam perilaku polugrinya; kawasan menjadi suatu

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi-sosial budaya dan politik; namun perilaku negara tersebut dapat melunturkan keberadaan regionalisme seperti ASEAN (Acharya, 2010).

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada *process tracing* dari restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dengan mempertimbangkan sifat diplomasi *middle power*. Adapun sifat diplomasi *middle power* ini akan membentuk norma, identitas, dan nilai dalam proses kebijakan luar negeri Indonesia terutama di forum multilateral seperti DK PBB. Dalam DK PBB sendiri dengan keterbatasan yang ada sebagai anggota tidak tetap, Indonesia melakukan perubahan-perubahan dari kebijakan luar negerinya yang juga melibatkan *institutional setting* domestik yaitu Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai pihak yang menyelenggarakan diplomasi Indonesia di PBB. Adapun perubahan kebijakan luar negeri Indonesia juga dalam hal ini sebagai *middle power* di aspirasikan dalam diplomasi regional dan tentunya membawa narasi dan upaya baru dalam memposisikan Indonesia dalam isu DK PBB. Diplomasi *middle power* di DK PBB, dengan posisi Indonesia yang menganut bebas aktif tentu akan menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dijadikan asesmen penting terutama dalam memajukan perdamaian global dengan *Indonesian way* di tengah perubahan keamanan yang lebih kontemporer dan politik global yang berubah.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan dua hal penting yang saling berkaitan untuk dibahas lebih lanjut sebagai diskusi pada penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, adapun masalah yang dirumuskan untuk menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Indonesia negara *middle power* me-restrukturisasi kebijakan luar negerinya untuk bermain sebagai pembangun jembatan (*bridge-builder*) dalam keanggotaanya di Dewan Keamanan PBB, terutama pada tahun 2019-2020?
2. Apa yang menjadi faktor, elemen, dan eksplorasi yang dilakukan oleh negara *middle power* terutama Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

keamanan internasional di tengah urgensi reformasi DK PBB dan perubahan dinamika geopolitik dalam 1 dekade belakangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya ditujukan untuk beberapa tujuan praktis dan akademis dalam studi hubungan internasional sesuai dengan cakupan dari batasan penelitian yang dikaji oleh penulis.

1. Tujuan Praktis

Dalam aspek tujuan praktis, tentunya penelitian diharapkan dapat memberikan temuan dan menjelaskan dinamika dari praktik kebijakan luar negeri negara *middle power* dengan tujuan spesifik yaitu:

- a. Bertujuan untuk mendukung perumusan kebijakan luar negeri negara *middle power* dalam isu perdamaian dan keamanan internasional yang strategis dan politis mempertimbangkan batasan politis dan strategis yang ada akibat dari proses kebijakan multilateral dan diplomasi yang dilakukan oleh negara anggota tetap DK PBB.
- b. Bertujuan untuk memberikan analisis mengenai bagaimana praktik kebijakan luar negeri tercermin dalam proses dan mekanisme dari DK PBB yang dimana negara *middle power* termasuk Indonesia telah berpartisipasi pada agenda tersebut.
- c. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran DK PBB sebagai forum diskusi menghasilkan kebijakan yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh perubahan struktur kebijakan luar negeri pada *middle power* yang menjadi anggota tidak tetap DK PBB termasuk Indonesia.
- d. Refleksi sesuai dengan praktik kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam masa keanggotaan selama DK PBB untuk masukan lebih lanjut dengan analisis yang lebih aplikatif dan strategis.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Tujuan Akademis

Dalam tujuan akademis, tentunya dalam hal ini akan berkaitan dengan pengembangan studi terkait isu diplomasi multilateral terutama dalam lingkup DK PBB dan peran negara *middle power*.

- a. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana diplomasi multilateral negara *middle power* mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dalam DK PBB terutama pada isu yang politis dan strategis.
- b. Bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterbatasan dan peran *middle power* dapat di jajahi lebih dalam untuk meningkatkan dampak dalam intervensi multilateral untuk penyelesaian konflik dan isu keamanan non tradisional yang dibahas pada DK PBB.
- c. Menjembatani diskursus neoliberal institusionalis dan neorealisme dalam melihat peran Indonesia yang selalu pragmatis dan kolaboratif (*collaborative strategic outlook*) dalam fora multilateral untuk mendukung bina damai dan aktivisme polugri yang bebas aktif.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Dalam segi manfaat praktis untuk aspek politik luar negeri dan praktik diskursus hubungan internasional, beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan kajian akademik mengenai aspek strategis dari diplomasi *middle power* untuk pengkajian kebijakan luar negeri lanjutan di tengah perubahan polugri Indonesia dari yang *outward looking* menjadi *inward looking* dibawah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- b. Bergunan untuk para praktisi analis kebijakan dalam memahami lingkungan strategis geopolitik kawasan dan dinamika dalam organisasi internasional

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

seperti PBB mengatasi ancaman perdamaian dan keamanan dunia dan bagaimana peran negara berkembang seperti Indonesia dimainkan.

- c. Berguna untuk mendukung analisis terhadap pola perilaku negara *middle power* yang menjadi anggota tidak tetap DK PBB dan di refleksikan dengan deliberasi polugri Indonesia di DK PBB sebelumnya sebagai *middle power* untuk menjadi *bridgebuilder*.

b. Manfaat Akademis

Dalam segi manfaat akademis, beberapa hal yang menjadi perhatian khusus untuk dilihat sebagai manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penelitian pertama yang menyinggung peran Indonesia sebagai pembangun jembatan *bridgebuilder* dalam DK PBB pada elaborasi yang lebih spesifik dalam kajian analisis kebijakan luar negeri.
- b. Sebagai penelitian yang memperdalam kajian *middle power* dan menguji apakah narasi *middle power* kontemporer masih relevan dengan realita diplomasi multilateral satu dekade ke belakang terutama dalam perspektif Indonesia di DK PBB pada era Joko Widodo 2019-2020.
- c. Memperdalam studi hubungan internasional mengenai diplomasi multilateral Indonesia yang dinamis dan fokus pada lingkungan dan kondisi regional yang mendorong juga restrukturisasi kebijakan luar negeri dengan kerangka operasionalisasi teori yang ada.

E. Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman terhadap konstruksi analisis penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membagi laporan ini menjadi tujuh bab bagian utama yang koheren satu sama lainnya sebagai berikut:

➤ **Bab 1. Pendahuluan**

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pendahuluan dalam hal ini berisi tentang latar belakang topik yang dibahas yang meninjau berbagai aspek pendahuluan seperti diplomasi multilateral pada isu keamanan dan perdamaian di DK PBB, tinjauan mengenai penelitian sebelumnya yang relevan, dan subbab lain yang berisi aspek tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang menjadi rincian penulis.

➤ **Bab 2. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, penulis melakukan tinjauan pustaka untuk meninjau dan menganalisis landasan teori dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori restrukturisasi kebijakan luar negeri dan teori dari konseptualisasi analisis mengenai *middle power* dalam studi hubungan internasional.

➤ **Bab 3. Metodologi Penelitian**

Pada metodologi penelitian, penulis membahas berbagai aspek teknis dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi dasar dari elaborasi analisis penelitian ini serta temuan yang ada dalam payung penelitian kualitatif.

➤ **Bab 4. Prolog: Analisis Konvergensi Restrukturisasi Diplomasi Negara *Middle Power* Mantan Anggota Tidak Tetap Dk Pbb**

Bab empat akan berfokus pada diplomasi *middle power* negara-negara yang ada di Asia-Pasifik dan Afrika (Aspasaf) yang pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB mempertimbangkan negara *middle power* yang juga tersebar di kawasan *global south*.

Adapun pada bab ini penulis akan merinci ke beberapa subbab yang berkaitan dengan faktor pendorong restrukturisasi kebijakan luar negeri tersebut dan orientasinya terhadap isu keamanan internasional; klasifikasi dan analisis peran para negara *middle power* sebagai *enforcer*, *advocator*, dan *assembler* yang tergabung dalam DK PBB sebagai anggota tidak tetap.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Adapun akan menekankan *middle power* dari Asia Timur (Jepang dan Korea Selatan), Australia, dan ASEAN (Malaysia dan Vietnam) yang merupakan negara berkembang dan termasuk *middle power* dari satu kawasan yang sama dengan Indonesia (ASEAN) karena beberapa titik konvergensi negara-negara ASEAN yang mirip dalam fora multilateral untuk isu keamanan dan perdamaian internasional. Akan ada pula subbab yang membahas kontribusi peran negara *middle power* dan bagaimana proses resolusi konflik terjadi setelah adanya restrukturisasi kebijakan luar negeri dari *middle power* secara umum.

➤ **Bab 5. Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di DK PBB Pada Era Presiden Jokowi**

Bab ini menjadi unit analisa utama dari penelitian yang dilakukan dalam topik ini. Untuk bab kelima akan berfokus pada restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dengan mempertimbangkan kajian dan praktek diplomasi multilateral *middle power* Indonesia saat tergabung di DK PBB pada era SBY (2007-2008) dan Jokowi (2019-2020). Penelitian ini akan membandingkan diplomasi multilateral Indonesia sebagai *middle power* yang berorientasi pada pendekatan *outward looking* dalam aktivisme kebijakan luar negerinya di DK PBB. Kemudian pada jaman Presiden Jokowi yang berubah menjadi *inward looking* serta bagaimana peran *bridgebuilder* terus dipertahankan.

Adapun temuan-temuan baru juga akan dirincikan oleh penulis lebih lanjut yang akan melahirkan pandangan-pandangan baru dari kajian yang sudah ada didukung dengan analisis diplomasi yang bersifat strategis dalam prakteknya dan selama presidensi Indonesia di DK PBB serta kontribusi Indonesia dalam fora multilateral untuk isu perdamaian dan keamanan internasional yang dibahas di DK PBB. Subbab akan berfokus pada analisa eksploratif mengenai hal-hal tersebut.

Adapun restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal ini ditelaah mengenai faktor, dampak, dan prosesnya dengan melihat temuan-temuan baru yang

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tidak ada pada penelitian sebelumnya. Dampak di level multilateral, terutama untuk agenda reformasi DK PBB, resolusi konflik berkelanjutan, dan proses pembentukan dan implementasi norma/ resolusi level multilateral akan dilihat selama Indonesia menjabat, terutama pada Presidensi dan keanggotaan 2019-2020.

➤ **Bab 6. Kestinambungan Peran Diplomasi Multilateral Middle Power Indonesia Sebagai Pembangun Jembatan (Bridge-Builder): Refleksi Dari DK PBB**

Bab enam akan menjadi pembahasan untuk subbab yang merupakan unit eksplanasi dari topik penelitian ini. Bab 6 akan berisi subbab untuk memperdalam bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia memberikan tren baru dan temuan baru dalam analisis diskursus kebijakan luar negeri dan bagaimana *middle power* kedepannya di tengah perubahan politik internasional dapat terus bermain. Adapun bab ini juga akan berisi subbab mengenai beberapa temuan-temuan mengenai kajian diplomasi *middle power* multilateral, yang akan fokus juga pada Indonesia sebagai entitas sentral dalam analisis ini.

➤ **Bab 7. Penutupan Dan Kesimpulan**

Bab tujuh akan berisi kesimpulan dan penutupan untuk mengkonfirmasi dan menyampaikan ringkasan dari temuan yang ada dalam penelitian ini serta langkah ke depan.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]